**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 - 2014)**

**Ice Trisnawati, Ali Nursal**

*Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti,*

 *Veteran Dalam No 56,Padang, 25113, Indonesia*

***Email*** *:* *ichetrisna12@gmail.com*

***ABSTRAK***

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan suatu daerah pembangunan, berdasarkan atas laporan keuangan yang telah diaudit terdapat beberapa permasalahan keuangan yang mempengaruhi pembangunan daerah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain : (1) Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah, Tujuan dari penulisan skripsi secara garis besar adalah untuk mengetaui kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini makan metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data dokumentasi jenis data sekunder dan sumber data diperolaeh dari laporan keuangan, metode analisis deskriptif kuantitatif dengan tolak ukur analisis rasio kemandirian keuangan daerah. Dari hasil pembahasan masalah maka dikentahui bahwa Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif.

**Kata kunci :** Laporan Keuangan, kinerja keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**.**

***ABSTRACK***

*South Coastal District is an area of ​​development, based on financial statements that have been audited are some of the financial problems affecting the development of the area facing the Government of South Coastal District, among others: (1) the reliance of local governments to subsidies from the central government which is reflected in the size of central government aid both from the regular budget, the subsidy autonomous regions as well as from the point of local government budget, (2) low ability of the region to explore potential sources of local revenue are reflected in the receipt of revenue (PAD), which is relatively small compared to the total regional revenues, (3) Lack of effort and ability in managing the reception area and explore the sources of revenue available. (4) Inefficiency of local governments to do the shopping area, the aim of the thesis outline is to mengetaui financial performance of local governments. Based on the purpose of this study ate data collection methods used are field research and library research, data collection techniques documentation secondary data types and data sources take of financial statements, methods of quantitative descriptive analysis with the benchmark analysis of the ratio of local financial independence. From the results of the discussion of issues that are known to the Financial Performance Management Revenue and Asset Finance South Coastal District as seen from Regional Financial Independence Ratio relatively still very low and relationship patterns including patterns Instructive relationship.*

**Keywords:** Financial Statements, financial performance. South Coastal District Local Government*.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keamanan.

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak bulan Januari tahun 2001 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu :

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, sudah enam belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kabupaten Pesisir Selatan, karena itu Pemerintah Kabupaten sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Salah satu cara untuk mengetahui kinerja pemerintah adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan yang telah diterapkan dan dilaksanakan. Sumber untuk menganalisis laporan keuangan adalah bagian laporan keuangan utama yang terdiri dari neraca, laporan keuangan, dan laporan realisasi anggaran.

Kabupaten Pesisir Selatan adalah Daerah Pembangunan, bedasarkan Penjelasan dari catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit terdapat beberapa permasalahan keuangan yang mempengaruhi pembangunan daerah yang dihadapi Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2010 – 2014 , permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah,
2. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah,
3. Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.
4. Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Analisis kinerja keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pesisir Selatan adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul ***“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan) tahun 2010-2014.”***

**Rumusan Masalah**

Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pemerintah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2010 – 2014 ?

**Batasan Masalah**

 Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut : Analisis rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio kemandirian keuangan daerah .

**Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2010 – 2014.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo,2010).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Ibnu Syamsi,1986: 199).

Menurut asyiaty, dkk (2008) kinerja keuangan pemerintah merupakan tingkat pencapaian hasil dari suatu kegiatan dalam sebuah instansi pemerintah sehubungan dengan penggunaan dana sesuai dengan kuantitas dan kualitas terukur dengan menggunakan prinsip efisiensi dan efektifitas.

**Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002: 121) :

1. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam (Abdul Halim 2007:230):
4. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
5. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
6. Mengukur sejauh mana aktivitas permerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
7. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
8. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

**Pengertian Analisis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 43) analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Menurut Harahap (2004 : 189) analisis adalah memecahkan atau menggabungkan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.

Sedangkan menurut Kamus Akuntansi (2000 : .48) analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.

**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

**Pengertian laporan keuangan pemerintah daerah**

Menurut Ilham Fahmi (2012, hal 2) Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan instansi, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai kinerja instansi tersebut.

Menurut Ahmad Syafi’i Syukur (2009, hal 21), yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah suatu daftar (form) yang disusun berdasarkan kaidah – kaidah tertentu dengan tujuan memberikan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Kasmir (2009, hal 7), Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukan kondisi keuangan perusaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Perusahaan saat merupakan kondisi dan keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untun neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi).

**Komponen – komponen laporan keuangan**

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports) dan Laporan Finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. *Laporan Realisasi Anggaran*

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Penjelasan dari Standar Akuntansi Pemerintahan No.2 Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan

Merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan hak tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

1. Belanja

Merupakan semuan pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

1. Transfer

Adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepala entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

1. Surplus/deficit

Adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran pembiayaan
3. Sisa lebih / kurang anggrana pembiayaan
4. *Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih*

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos – pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya dan lain – lain
5. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur - unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1. *Neraca*

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Kas Dan Setara Kas
2. Investasi Jangka Pendek
3. Piutang Pajak Dan Bukan Pajak
4. Persediaan
5. Investasi Jangka Panjang
6. Aset Tetap
7. Kewajiban Jangka Pendek
8. Kewajiban Jangka Panjang
9. Ekuitas
10. *Laporan Operasional*

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan dari kegiatan operasional;
2. Beban dari kegiatan operasional
3. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada
4. Pos luar biasa, bila ada
5. Surplus/defisit
6. *Laporan Arus Kas*

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.
3. *Laporan Perubahan Ekuitas*

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1. *Catatan atas Laporan Keuangan*

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian menunjukkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern, terutama pemerintah pusat dan propinsi, semakin rendah. Selain itu rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi (Halim, 2007:232).

Menurut Halim : 2004, Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$RKKD=\frac{Pendapatan Asli Daerah}{Pendapatan Transfer}x 100\%$$

Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan ) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**



*Sumber: Abdul Halim (2007: 1)*

1. Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

**Analisis Varians**

**Analisis varians Anggaran Pendapatan**

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Dalam analisis selisis anggaran pendapatan hal pertama yang harus dilakukan adalah :

1. Melihat besar selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya, baik secara nominal maupun persentase
2. Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar
3. Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan

Kinerja pemerintah daerah dikatan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui hal itu tidak terlalu mengejutkan karna memang seharusnya demikian. Tetapi jika target pendapatan tidak tercapai hal ini butuh penelaahan lebih lanjut terkait hal tidak tercapainya anggaran.

**Analisis Varians Belanja Daerah**

Terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbadaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Menurut mardiasmo (2009;70), varian belanja daerah dapat dihitung menggunakan rumus :

***Varian = realisasi belanja – anggaran belanja***

Analisis varians cukup sederhana namun memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasi yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya.

Selisish anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis yaitu :

1. Selisih disukai (favorable variance)
2. Selisih tidak disukai (unfavorable variance)

Dalam hal ini realisasi belanja lebih kecil anggarannya maka disebut favorable variance sedangkan jika realisasibelanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan un favorable variance.

Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, pertama hal ini menunjukan adanya afisiensi anggaran. Kedua justru sebaliknya jika terjadi selisih kurang maka sangat memungkinkan telah terjadi kelemahan perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa disebabkan karna adanya program atau kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah diamanatkan dalam anggaran.

**Pendapatan Asli Daerah**

**Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

Menurut Herlina Rahman (2005:38) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain , pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Warsito (2001:128), pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari : pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMN) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

**Sumber-sumber pendapatan asli daerah**

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yaitu:

1. *Hasil pajak daerah*

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya  “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”.

Sedangkan Siagin merumuskannya sebagai, “pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”. Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

1. Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum public.

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
12. *Hasil retribusi daerah*

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dan pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171) adalah pungutan daerah sebagal pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik Iangsung maupun tidak Iangsung”.

Dari pendapat tersebut dapat diikhtisarkan cirri - ciri pokok retribusi daerah, yakni:

1. Retribusi dipungut oleh daerah
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang Iangsung dapat ditunjuk
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. RetribusPelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
15. *Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan*

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

1. *Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah*

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan seIisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/ ataupengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

**Pendapatan Transfer**

**Pengertian Pendapatan Transfer**

Penjelasan dari Standar Akuntansi Pemerintah No. 2 Pendapatan transfer merupakan penerimaan uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepala entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara ( APBN ) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah ( Abdullah dan halim 2003 ).

Menurut Fauzan Misra ( 2003 ) Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.

**METODE PENELITIAN**

**Metode Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

* + 1. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Dilakukan dengan cara menganalisis dan mempelajari catatan – catatan atau laporan keuangan dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah di Kbaupaten Pesisir Selatan
		2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research* )

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data skunder dengan cara study literature atau study kepustakaan.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :Dokumentasi yaitu data diperoleh dengan melihat dan mempelajari dokumen – dokumen dan arsip – arsip instansi yang berhubungan dengan atau ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik berupa data umum maupun data khusus.

**Jenis dan Sumber Data**

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka jenis data yang digunakan adalah skunder yaitu melakukan perhitungan dan penganalisaan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data diperoleh diperoleh melalui laporan-laporan, jurnal, atau data yang sudah dipublikasikan berupa jumlah pegawai, sejarah organisasi, struktur organisasi dan proses operasi organisasi. Adapun tolok ukur yang akan digunanakan dalam teknik analisis ini adalah: ***Rasio Kemandirian daerah.***

**Metode Analisis**

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan dan penganalisaan terhadap laporan realisasi anggaran tahun 2010 - 2014 yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolok ukur yang akan digunanakan dalam teknik analisis ini adalah ***Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD ) dan Analisis Varians Anggaran dengan Realisasi.***

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$RKKD=\frac{Pendapatan Asli Daerah}{Pendapatan Transfer}×100\%$$

Rumus yang digunakan untuk mengukur Analisis Varians Anggaran dengan Realisasi adalah sebagai berikut :

*Varians =Realisasi - Anggaran*

**ANALISA DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten pesisir selatan dapat dihitung dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah.

**Tabel 4.2**

**Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010 – 2014**



*Sumber : Laporan Keuangan DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan*

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer}×100\%$$

$$RKKD 2010=\frac{24,207,957,897.00}{540,520,360,257.00}×100\% =4.48\%$$

$$RKKD 2011 =\frac{38,286,012,674.00}{758,159,200,565.00}×100\% =5.05\%$$

$$RKKD 2012 = \frac{36,322,931,991.00}{831,038,503,189.00}×100\% =4.37\%$$

$$RKKD 2013 = \frac{46,674,845,489.00}{974,277,414,231.00} ×100\% =4.79\%$$

$$RKKD 2014 = \frac{81,945,813,126.00}{1,082,441,909,737.00} ᵪ 100\% =7.57\%$$

**Tabel 4.3**

**Pola Hubungan Dan Tingkat Kemandirian Laporan Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2010 – 2014**



*Sumber : Lampiran 1 – 5 (Data sekunder diolah)*

**Analisa Kinerja Keuangan Berdasarkan Laporan Keuangan Periode 2010 – 2014**

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tingkat kemandiriannya cenderung mengalami kenaikan, hal ini bisa di lihat dari adanya hasil perhitungan rasio kemandirian pada tahun 2010 rasio kemandirian 4,48%, ini menunjukkan bahwa dalam membiayai kegiatan rumah tangganya Pesisir Selatan masih sangat tergantung kepada bantuan dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2011 rasio kemandirian naik menjadi 5,05%, hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, tahun 2012 rasio kemandiriannya 4,37% hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah semakin berkurang jika dibandingkan dengan dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2010 dan 2011 , untuk tahun 2013 rasio kemandirian 4,79%, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2012 akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2011 kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi masih sangat kecil, Dan pada tahun 2014 kesadaran masyarakat dalam membayar pajak meningkat dua kali lipat dari empat tahun terakhir menjadi 7,57%. Jika hasil rasio kemandirian dari tahun 2010 sampai 2014 dibandingkan, maka tingkat kemandirian daerah Pesisir Selatan masih rendah sekali dengan kriteria hubungan Instruktif, dalam arti kata peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

Dari hasil perhitungan Rasio Kemandirian Daerah diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten pesisir selatan sejak lima tahun terakhir ini berpola hubungan instruktif. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pendapatan yang dihasilkan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan hasil pengeloaan kekayaan yang dipisahkan serta masih tingginya dana perimbangan dari pusat dimana sisa hasil anggaran tahun sebelumnya juga tergolong tinggi.

**Analisis Varians**

**Analisis Selisih Anggaran dan Realisasi Pendapatan 2010**

**Tabel 4.4**

**Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2010**

****

*Sumber:Laporan keuangan DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan(Lampiran 1 Diola )*

Bedasarkan tabel 4.4 diketaui anggaran untuk pendapatan sebesar 737.210.766.284,00 sementara terealisasi sebesar 731.534.491.892,00 dengan persentase realisasi sebesar 99,23% hal ini berarti pendapatan belum terealisasi dengan baik. Jika ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah pemerintah kabupaten pesisir selatan tidak bisa menggali Sumber daya yang ada karna jika dinilai dari Pendapatan Asli Daerah realisasi selalu lebih kecil dari anggaran yang telah dianggarkan. Sementara untuk dana perimbangan dan Lain – lain pendapatan yang sah realisasi selalu lebih besar dari anggaran hal ini berarti pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan masih berketergantungan kepada bantuan dari pemerintah pusat atau daerah otonomi lainnya.

**Analisi Varians Anggaran dan Realisasi Belanja 2010**

**Tabel 4.5**

**Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2010**

****

*Sumber :Laporan keuangan DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan(Lampiran 1 Diolah)*

Bedasarkan tabel 4.9 Dapat diketahui bahwa anggaran untuk belanja daerah sebesar 799.678.247.405,00 dan untuk realisasi sebesar 725.141.397.800,00 dengan persentase realisasi sebesar 90.68% . Dalam merealisasikan anggaran belanjanya daerah pesisir selatan pada tahun 2010 sudah cukup baik karna realisasi tidak melebihi anggaran yang telah direncanakan.

**PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Dari tabel hasil perhitungan Rasio Kemandirian Daerah diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten pesisir selatan sejak lima tahun terakhir ini berpola hubungan instruktif. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pendapatan yang dihasilkan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan hasil pengeloaan kekayaan yang dipisahkan serta masih tingginya dana perimbangan dari pusat dimana sisa hasil anggaran tahun sebelumnya juga tergolong tinggi.

Untuk meningkatkan kemandirian daerahnya pemerintah daerah harus berupaya untuk lebih meningkatkan PAD nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga ketergantungan pendapatan dari Pemerintah Pusat bisa semakin berkurang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hony Andhiantoko (2013) menyatakan bahwa Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

**Analisis Varians**

Dari hasil pengujian analisis varians diatas diketahui dalam merealisasikan anggaran pendapatannya pemerintah kabupaten pesisir selatan dari tahun 2010 – 2014 sudah cukup baik karna realisasi anggarannya dapat melebihi anggaran yang telah ditargetkan. Sementar untuk analisis varians belanja dan pembiayaan daerah kabupaten pesisir selatan dari tahun 2010 – 2014 dapat merealisasikan pengeluarannya dengan baik karna tidak melebihi anggaran yang telah direncanakan.

Pemerintah daerah dikatakan memliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarakan. Sebaliknya jika realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan maka hal itu dinilai kurang baik. Berbanding tebalik dengan kinerja belanja dan pembiayaan daerah, pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pembelanjaan dan pembiayan yang baik apabila merealisasikan belanja dan biaya dibawah anggaran maka hal ini dinilai baik, akan tetapi jika sebaliknya realisasi lebih besar dari anggaran ini dinilai kurang baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh kristian kainde (2013) disimpulakan bahwa kota bitung telah merealisasikan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerahnya dengan baik.

**KESIMPULAN**

Dari hasil analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010 – 2014 dapat disimpulkan bahwa : Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan yang dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Berturut-turut dari tahun 2010 sampai dengan 2014 rasionya masing-masing sebesar : 4.48% , 5.05% , 4.37% , 4.79% , 7.57%.

***DAFTAR PUSTAKA***

Dr. Agussalim Manguluang, SE, MS, 2010, *Metodologi Penelitian*, Ekasakti Pres, Padang

Dr. Agussalim Manguluang, SE, MS,2013, *Statistik*, Ekasakti Pres, Padang

Dr. Kasmir, 2010, *Analisa Laporan Keuangan***,** Raja Grapindo, Jakarta

Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat

Ibnu Syamsi. (1986). *Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional. Jakarta*: CV Rajawali

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Hony Adhiantoko, 2013, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten***,.** Skripsi,Fakultas Ekonomi:Universitas Negri Yogyakarta

Jusmawanti,2010,*Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah*,.Skripsi,Fakultas Ekonomi dan Bisnis :Universitas Hasanuddin:Makassar

Hendro Sumarjo,2010, “*Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.”* *Skripsi,*Fakultas Ekonomi:Universitas Sebelas Maret.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38498/4/Chapter%20II.pdf>

<http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-kinerja-keuangan-menurut.html>

<https://meirinaraspalia.wordpress.com/2013/03/27/rangkuman-laporan-keuangan-2/>

<http://nanangbudianas.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-pembiayaan-dan-jenis-jenis.html>

<http://walangkopo99.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-pendapatan-menurut-para-ahli.html>

<http://www.statistikian.com/2014/08/wilcoxon-signed-rank-test.html>